

ABSTRAK

Nama : Handriyanto Wijaya
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul :
***ECCLESIASTICAL DIPLOMACY* VATICAN DALAM MENDUKUNG UPAYA KEBEBASAN BERAGAMA UMAT KATOLIK DI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK PADA MASA KEPEMIPINAN PAUS FRANSISKUS**

(xii+108 halaman: 2 gambar)

Menurut ajaran sosial gereja Katolik bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada setiap manusia yang diberikan oleh Allah melalui misteri penebusan Yesus Kristus. Deklarasi *Dignitas Humane* yang mengacu kepada Konsili Vatikan II menyatakan bahwa kebebasan beragama adalah hak dan martabat dari seorang manusia (*Imago Dei*). Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai negara komunis memiliki kebijakan pengendalian dan pengawasan secara ketat hak kebebasan beragama terhadap warga negaranya. Xi Jinping sebagai pemimpin RRT yang juga merupakan bagian dari Partai Komunis China berpandangan bahwa keberadaan umat Katolik yang tunduk kepada Paus Fransiskus adalah sebuah ancaman negaranya. Sedangkan menurut teori liberalisme bahwa kebebasan beragama merupakan hak individu yang tidak boleh dibatasi oleh siapapun termasuk negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan berbagai data untuk menjawab permasalahan penelitian. Penulis menemukan bahwa alasan pemerintah RRT melakukan pengawasan dan kontrol ketat kepada umat Katolik, karena Vatikan merupakan bagian negara barat berideologi demokrasi yang bertentangan dengan paham komunis dan tujuan negara RRT. Sebagai upaya memperjuangkan hak kebebasan beragama bagi umat Katolik RRT, Paus Fransiskus menggunakan *Ecclesiastical Diplomacy* yang berpijak kepada ajaran Kristus dan tradisi gereja. Dampak dari *Ecclesiastical Diplomacy* dimana tahun 2018 Vatikan dan RRT mencapai suatu kesepakatan perjanjian sementara mengenai aturan penunjukan Uskup di RRT, yang kemudian diperpanjang pada tahun 2020. Kesepakatan tersebut bukanlah kesepakatan politik akan tetapi hanya sebatas terkait pastoral. Walaupun kesepakatan RRT dan Vatikan tidak berdampak signifikan atas hak kebebasan umat Katolik di RRT, akan tetapi bagi Paus Fransiskus kesepakatan tersebut merupakan kesempatan gereja dalamewartakan ajaran Kristus mengenai cinta kasih dan perdamaian dunia, mengingat hingga saat ini pemerintah RRT masih tidak membuka diri dalam hubungan diplomatik dengan Vatikan. Selain itu kesepakatan tersebut berdampak dalam mengurangi tensi hubungan politik RRT dengan Vatikan dan umat Katolik.

Kata Kunci: *Ecclesiastical Diplomacy*, Kebebasan Beragama, Xi Jinping dan Paus Fransiskus

Referensi : 100 (1979-2022)

ABSTRACT

Name : Handriyanto Wijaya
Program Study : International Relations
Titel :

VATICAN ECCLESIASTICAL DIPLOMACY IN SUPPORTING THE EFFORT FOR RELIGIOUS FREEDOM OF CATHOLICS IN PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA UNDER THE LEADERSHIP OF POPE FRANCIS

(xii+108 Pages+ 2 Pictures)

According to the social teaching of the Catholic church that human rights are rights that are owned and attached to every human being given by God through the mystery of the redemption of Jesus Christ. The Declaration of Dignitas Humane which refers to the Second Vatican Council states that freedom of religion is the right and dignity of a human being (Imago Dei). The People's Republic of China (PRC) as a communist country has a policy of strictly controlling and supervising the rights of religious freedom to its citizens. Xi Jinping as the leader of the PRC who is also part of the Chinese Communist Party views that the existence of Catholics who submit to Pope Francis is a threat to his country. Meanwhile, according to the theory of liberalism, religious freedom is an individual right that should not be limited by anyone, including the state. This study uses qualitative methods by collecting various data to answer research problems. The author finds that the reason the PRC government carries out strict supervision and control over Catholics is because the Vatican is part of a western country with a democratic ideology which is contrary to communist ideology and the goals of the PRC state. As an effort to fight for the right to religious freedom for Chinese Catholics, Pope Francis uses Ecclesiastical Diplomacy which is based on the teachings of Christ and church traditions. The impact of Ecclesiastical Diplomacy where in 2018 the Vatican and PRC reached an agreement on a provisional agreement regarding the rules for appointing bishops in China, which was later extended in 2020. The agreement was not a political agreement but was only limited to pastoral matters. Although the agreement between China and the Vatican has no significant impact on the rights of freedom of Catholics in China, for Pope Francis the agreement is an opportunity for the church to proclaim the teachings of Christ regarding love and world peace, considering that until now the Chinese government has not opened up to diplomatic relations with the Vatican. In addition, the agreement has an impact in reducing the tension in China's political relations with the Vatican and Catholics.

Keywords: Ecclesiastical Diplomacy, Religious Freedom, Xi Jinping, and Pope Francis

References: 100 (1979-2022)